

## MENUJU PERGURUAN TINGGI BERBASIS RISET DAN PENGANALISIS KEBIJAKAN

**Deddy Mulyadi<sup>1</sup>**

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara  
di Bandung/ Guru Besar Administrasi Publik  
e-mail: demul10@yahoo.com

### Abstrak

Tulisan dalam makalah ini merupakan kajian teoritis yang membahas tentang Menuju Perguruan Tinggi Berbasis Riset dan Penganalisis Kebijakan. Dalam artikel ini menelaah mengenai pentingnya Riset dan Penganalisis Kebijakan sebagai pilar dalam pengembangan Perguruan Tinggi Berbasis Riset. Oleh karena itu, salah satu peran yang harus dijalankan Perguruan Tinggi dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi salah satunya adalah kegiatan Riset yang harus mendapat dukungan dan perhatian dari pemerintah.

Berkaitan dengan Penganalisis kebijakan publik dapat dipakai sebagai alat untuk memperbaiki pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah secara lebih baik dengan memecahkan persoalan-persoalan masyarakat yang kompleks dan penuh intredependensi. Maka kemanfaatan dari analisis masalah kebijakan dalam kerangka pembuatan kebijakan publik selalu diperuntukan bagi kemaslahatan masyarakat dan negara.

Dengan demikian ketika memperhatikan proses kebijakan ini suatu Penganalisis kebijakan dapat menghasilkan informasi yang tepat. Maka pengelolaan Riset dan Penganalisis Kebijakan di Perguruan Tinggi sangat penting dalam mencapai perubahan dalam menuju Perguruan Tinggi Berbasis Riset.

**Kata Kunci:** Perguruan Tinggi, Riset, Penganalisis Kebijakan dan Pemberi Saran Kebijakan

### TOWARD A POLICY RESEARCH AND ANALYSIS BASED HIGHER EDUCATION INSTITUTION

#### Abstract

*This paper presents a theoretical review discussing Towards Policy Research and Analysis Based Higher Education. It examines the importance of Policy Research and Analysis as a pillar in the development of a research-based higher education institution. Therefore, one of the roles that should be run by higher education institutions in compliance with the Three Responsibilities (Tridharma) of Higher Education is conducting research activities, which deserves the support and attention of the government.*

*As widely known, public policy analysis can be used as a tool to accomplish better governance management to solve the complex and interdependent problems of society. The analysis of policy issues within the framework of public policy making has always been addressed for the benefits of society and the state.*

*Thus, in the policy process, a policy analysis can generate precise information. Having considered this, the management of Policy Research and Analysis at a Higher Education Institution is very crucial in achieving a change towards a Research Based Higher Education Institution.*

**Keywords:** higher education, research, policy analysis, and policy recommendation

### A. PENDAHULUAN

Perjalanan suatu perguruan tinggi menjadi maju, selalu mencatat bahwa diantaranya fungsi riset memegang peranan penting di dalamnya. Peran ini meliputi peran sebagai penyedia tenaga ahli (Penganalisis kebijakan) sumberdaya untuk riset dalam berbagai bidang dan hasil risetnya yang bermanfaat. Kenyataan tersebut menumbuhkan harapan bahwa perguruan tinggi/lembaga riset lainnya agar mampu memberikan kontribusi nyata untuk membangun kemajuan bangsa.

Menyikapi kondisi tersebut, perlu disadari pula bahwa kondisi perguruan tinggi di negara-negara maju dewasa ini telah melalui proses

evolusi panjang yang berlangsung ratusan tahun. Pada awal abad-18, sebagian besar perguruan tinggi di Eropa dan Amerika Utara masih merupakan perguruan tinggi pendidikan dan pengajaran, di mana aktivitas utamanya adalah transfer knowledge. Satu abad kemudian, pada awal abad ke-19, dipelopori oleh perguruan tinggi di Jerman, Dunia perguruan tinggi berevolusi menjadi Perguruan Tinggi Riset (*Research University*). Ciri utamanya yaitu disamping kegiatan pendidikan dan pengajaran, perguruan tinggi juga melakukan penelitian dan pengembangan menjadi perhatian utama pengelola perguruan tinggi di berbagai negara.

Selanjutnya setelah perang dunia kedua, proses evolusi perguruan tinggi di negara maju berlanjut menjadi Perguruan Tinggi Entrepreneur (*Entrepreneur University*). Hal ini yang mendasarinya yaitu sebuah perguruan tinggi yang telah mapan dalam kegiatan pengajaran dan riset, kemudian dapat menjalin banyak hubungan dengan stakeholders, sehingga mampu menghasilkan berbagai kebijakan publik yang inovatif dan Inovasi-inovasi hasil risetnya itulah pada akhirnya yang diharapkan dapat membawa kemajuan dalam kehidupan bangsa dan negara di berbagai bidang.

Proses evolusi perguruan tinggi sebagaimana digambarkan di atas, diharapkan terjadi juga di berbagai Perguruan Tinggi, agar dapat memberikan kontribusi nyata dalam arah pembangunan dan kebijakan Negara yang berkualitas.

Kegiatan tersebut dilakukan agar dapat di ketahui secara jelas dan tepat akar permasalahan publik yang hendak dijadikan sasaran kebijakan yang diharapkan menjadi landasan langkah politis di tempuh pemerintah guna mengambil suatu kebijakan yang dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah (*valid*) kepada publiknya. Hasil riset yang dapat di percaya dan bersifat problem solving menjadi tantangan tugas sekaligus tanggung jawab perguruan tinggi serta berbagai lembaga riset untuk mengaktualisasikannya.

Memperhatikan hal tersebut betapa pentingnya peran dan kedudukan Perguruan Tinggi pada umumnya dalam mendukung proses risetnya untuk memberikan saran kebijakan dalam basis pengetahuan, maka aktivitas riset/kajian dan/atau analisis kebijakan menjadi suatu keniscayaan untuk dilakukan.

Oleh karena itu, salah satu peran yang harus dijalankan Perguruan Tinggi dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi salah satunya adalah kegiatan penelitian (riset) yang harus mendapat dukungan dan perhatian pemerintah dalam penganggarannya.

### Riset Dan Peranan Penganalisis Kebijakan

Kebijakan publik merupakan instrument vital dan strategis dari proses penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pelayanan, pemberdayaan publik. Landasannya adalah segala aktivitas penyelenggaraan negara dimulai dengan kebijakan publik.

Sebagaimana kita ketahui bahawa salah satu ciri administrasi negara adalah *legalistic approach*. Tidak hanya itu, Resenbloom dkk dalam *Public Administration: Understanding Management, Politics,*

*and Law in The Publik Sector* (2008:5) mengemukakan bahwa "*public administration is the use of manajerial, political, and legal theories, and processes of fulfill legislative, excituve, and judicial mandates for the provision of government regulatory and service function.*"

Oleh kerana itu dikatakannya bahwa kewajiban pemerintah dalam konteks administrasi public adalah mempromosikan kepentingan publik. Landasan mendasar yang berbasis moral dari administrasi publik adalah "*must serve a higher purpose.*" Jika hal tersebut gagal dilakukan, maka administrator publik sudah sepantasnya di kritisi. Berdasarkan pemikiran Rosenbloom tersebut, maka isu sentral yang mengemuka adalah bagaimana memastikan bahwa para administrator Negara telah mempresentasikan dan merespon kepentingan warga negaranya sebagaimana landasan moral yang diamanatkan tersebut.

Oleh sebab itu bukan hal mudah untuk mewujudkannya. Namun, administrasi publik memiliki satu alat yang tidak dimiliki oleh sektor swasta, masyarakat atau aktor manapun. Alat tersebut adalah "*sovereignty*" atau kedaulatan. *Sovereignty is the concept that government is the ultimate repository of supreme political power and authority. It involves a monopoly over yhe legitimate use of force in society* ( Rosenbloom, Kravchuck & Clerkin, 2008:11).

Disanalah jembatan penghubung administrasi publik dan kebijakan publik berada. Kedaulatan yang mereflesikan perpaduan antara kekuasaan antara kekuasaan Negara dan kehendak rakyat yang tercermin dalam kepentingan publik yang harus diwujudkan melalui suatu alat yang diutamakan kebijakan publik.

Dengan konteks tersebut, maka hal penting yang menjadi pertanyaan mendasar dan perlu kita perhatikan dalam riset atau analisis kebijakan publik adalah "seberapa jauh kebijakan publik 'berkolaborasi' dengan kehendak publik atau warga negaranya" Pada tataran ini, kebijakan publik seringkali dimaknai sebagai sebuah tindakan yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan untuk memastikan tujuan-tujuan yang sudah dirumuskan dan disepakati oleh publik bisa tercapai.

Memperhatikan makna di atas maka dalam proses pembuatan kebijakan publik peran riset dan analisis kebijakan menjadi suatu yang penting untuk mengkolerasikan apa yang diharapkan dan dibutuhkan masyarakat dengan peran *policy makers* dalam menyusun secara formal kebijakan publik tertentu. Pada konteks ini dapat dikatakan bahwa

keberadaan Perguruan Tinggi berperan sebagai pusat riset yang konseptual dalam rangka pengembangan ilmu dan praktiknya.

Namun secara konseptual-teoritis, kelahiran studi ataupun analisis kebijakan merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat dihindarkan dalam perkembangan keilmuan maupun praktik administrasi publik.

Keperluan itu sangat erat kaitannya dengan peran (*role*) yang diharapkan dari administrator atau pakar administrasi publik. Mengapa?

Karena ia terlibat dalam proses pembuat kebijakan, akan tetapi lebih dari sekedar itu bahwa para administrator atau pakar administrasi publik diharapkan akan mampu memberikan peran yang besar dalam memberikan koreksi terhadap berbagai kesalahan (ketidaktepatan) dalam perumusan berbagai kebijakan yang telah dan akan dihasilkan pemerintah.

Oleh sebab itu riset dan/atau analisis kebijakan publik menjadi dasar yang kuat bagi seseorang yang ingin mengembangkan profesi sebagai seorang analis kebijakan publik. Profesi ini merupakan bidang riset yang mulai menjadi perhatian yang sangat menarik bagi pakar administrasi publik pada beberapa dekade terakhir. Tepatnya beberapa tahun setelah perang dunia kedua di Amerika Utara dan Eropa.

Kebijakan publik pertama kali disunting oleh para sarjana politik antara lain Daniel Larner dan Harold D. Lasswell dalam bukunya yang berjudul "*A Pre-View Of policy Sciences*" Laswell mengatakan bahwa "studi kebijakan" tidak dibatasi oleh tujuan-tujuan ilmu tetapi juga secara mendasar mempunyai orientasi praktis.

Selanjutnya tujuan analisis atau studi kebijakan tidak sekedar membuat keputusan yang lebih efektif dan efisien, tetapi juga berupaya menawarkan solusi melalui pendekatan ilmu (metodologi analisa kebijakan) untuk memperbaiki pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah secara lebih baik dengan memecahkan persoalan-persoalan masyarakat yang kompleks dan penuh intredependensi. Tujuan akhirnya adalah realisasi martabat manusia dalam terori dan praktik.

Artinya bahwa kemanfaatan dari analisis masalah kebijakan dalam kerangka pembuatan kebijakan publik selalu diperuntukan bagi kemaslahatan masyarakat dan negara serta dunia secara global.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka kualitas kebijakan publik tentunya menjadi syarat utama, agar masalah publik dapat tertangani dengan baik.

## B. PROSES KEBIJAKAN YANG BERKUALITAS

Pendekatan kualitas, sangat berkaitan dengan hasil akhir atau *output* yang di dihasilkan. Pencapaian kualitas akhir, tidak dapat terlepas begitu saja dari proses yang ada di dalamnya. Oleh karenanya proses akan menentukan hasil akhir atau kualitas. Demikian halnya dengan kebijakan sangat bergantung pada tahapan proses yang dilaluinya. Proses tersebut merupakan suatu tindakan yang sangat kompleks, ilmiah, rasional, melalui tahapan-tahapan. Seperti yang di kemukakan oleh tokoh-tokoh seperti Lasswell, Brewer, Jones, Anderson, dan lain-lain yang secara umum dapat ditarik benang merah sebagai berikut;

- 1). Penyusunan agenda (*agenda-setting*),
- 2). Negosiasi kebijakan (*policy formulation*),
- 3). Pengambilan keputusan (*decision-making*),
- 4). Implementasi kebijakan (*policy implementation*),
- 5). Evaluasi kebijakan (*policy evaluation*) (dalam Howlett dan Ramesh, 1995&2011).

Didalam praktiknya adapula proses kebijakan yang di tempuh tanpa mengikuti tahapan-tahapan dalam proses kebijakan yang baku. Kebijakan yang di buat *policy makers* dan analis dengan hanya mencari pembenaran-pembenaran yang rasional dan dapat diterima oleh publik.

Seperti dikatakan Meltser (1979:4) bahwa para analis kebijakan dalam birokrasi tidak tampil sebagai seorang ilmuwan kebijakan model Lasswell. Mereka tidak mempunyai pengetahuan dan kesempatan untuk mengerjakan masalah-masalah kritis dan berjangka panjang dalam hal kebijakan publik. Mereka hanya berperan sebagai operator yang mengumpulkan informasi mengenai kebijakan tertentu dibanding mengembangkan teori tentang proses pembuatan kebijakan yang unggul.

Dengan demikian kedua hal di atas, dapat dikatakan bahwa kita jangan berfikir simplistik terhadap riset dan analisis kebijakan. Setiap peneliti dan pejabat publik di Republik ini, seharusnya berperan sebagai seorang analis kebijakan yang dapat menemukan suatu formula yang tepat dan mujarab untuk menghasilkan suatu kebijakan publik yang dapat meyakinkan publik (*stakeholders*) tentang kebijakan yang dianalisanya. Hasil kebijakan yang di buat nantinya diharapkan mampu mengubah alokasi sumber-sumber kehidupan yang mempunyai kemanfaatan yang lebih luas dan lebih baik.

Ukuran seberapa besar pemahaman seorang Researcher atau analis terhadap akar permasalahan dan suatu urusan publik yang hendak diatur dalam kebijakan publik, tentunya akan berdampak signifikan pada kualitas kebijakan

yang dihasilkan. Setidaknya hal tersebut akan membantu dan mendorong pembuat kebijakan untuk lebih memiliki *sense of policy analysis of crisis* terhadap problema yang berkembang dalam masyarakat terkait berbagai isu ranah penyelenggaraan Negara.

Selanjutnya sebagai suatu upaya ilmiah dengan pendekatan yang bersifat multidisipliner disertai dengan berbagai metode analisa yang dipinjam dan berbagai disiplin ilmu, tentu proses riset dan analisis kebijakan akan menjadi suatu pengetahuan yang sangat membantu dalam merumuskan dan memecahkan masalah, sebagai penuntun dalam menciptakan, menilai secara kritis, dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan terhadap masalah yang dihadapi. Atau dengan perkataan lain, dalam posisi tersebut Perguruan Tinggi berperan sebagai pusat riset yang mampu menyediakan informasi yang relevan, bermutu, *elegant, up to date*, dan berguna untuk menjawab beberapa pertanyaan penting seperti:

*Pertama*, mengapa muncul masalah public tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan negara? Mengapa suatu kebijakan diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut? Apa faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya kebijakan tersebut?

*Kedua*, Siapa aktor-aktor yang terlibat dalam proses kebijakan? Apa kepentingan mereka masing-masing?

*Ketiga*, Gagal atau berhasilkah kebijakan yang dilaksanakan itu? Apa faktor-faktor yang mempengaruhinya?

*Keempat*, Apa dampak dan pelaksanaan kebijakan? Komponen atau instrument apa yang dimiliki kontribusi terhadap dampak? Bagaimana dampak tersebut didistribusikan? dan

*Kelima*, Apa tindakan yang paling menguntungkan untuk menyelesaikan masalah-masalah publik? Jawaban pertanyaan-pertanyaan tersebut akan membuahkan informasi yang berguna tentang masalah kebijakan, masa depan kebijakan aksi kebijakan, dan kinerja atau kualitas kebijakan.

Berdasarkan itu, proses analisis kebijakan dalam memperbaiki kualitas kebijakan sangat bergantung pada seberapa valid, elegant, bermutu, up to date, atau berguna informasi yang dihasilkan dan diberikan tim pengkaji atau analisis kebijakan kepada *policy makers* dalam mengambil kebijakan guna mengatasi permasalahan-permasalahan publik yang muncul. Informasi yang diharapkan demikian itu, tentunya membutuhkan persyaratan-persyaratan antara lain:

## 1. Kualitas Riset dan Tim Analis Kebijakan

Bahwasanya aktor yang terlibat langsung dalam proses pembuatan kebijakan, persepsi analis dan pembuat kebijakan akan sangat berpengaruh pada kualitas kebijakan yang diambil. Menurut Grindle dan Thomas (1991, 34-37) faktor-faktor itu adalah;

*Pertama*, latar belakang pendidikan; dengan pendidikan formal yang di miliki, khususnya keahlian pada bidang-bidang tertentu seperti ekonomi, sosiologi, statistik, administrasi, hukum, pendidikan dan lain-lain, akan memberikan kontribusi dalam menganalisis secara substansial dan rasional setiap masalah publik di masyarakat, berdasarkan keahlian yang dimilikinya. Dengan demikian, ketidaktepatan informasi dapat dihindari seminimal mungkin.

*Kedua*, Tujuan-tujuan dan sifat-sifat pribadi (*personal attributes and goals*): karakteristik personal ini di samping berpengaruh pada pandangan terhadap perubahan kebijakan yang akan di lakukan, ia pun dapat menentukan seberapa besar kualitas informasi kebijakan itu bisa dihasilkan dan diterima. Kecenderungan seorang analis dan pembuat kebijakan dalam mengambil keputusan dengan berani untuk menghadapi resiko-resiko yang ada, berani membuat konsesus dalam konflik yang ada adalah prasyarat yang dapat mempengaruhi perubahan kebijakan sehingga dapat di pertimbangkan secara tepat.

*Ketiga*, Predisposisi ideology (*ideological predisposition*); setiap analis dan pembuat kebijakan memiliki nilai-nilai tertentu yang diutamakan dalam pengambilan keputusan. Nilai-nilai akan selalu dikedepankan ketika ia menghadapi masalah atau isu-isu publik. Misalnya nilai keadilan, social, pemerataan dan sebagainya. Nilai-nilai ini diharapkan paling kurang adaptif selalu dengan nilai-nilai umum yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.

*Keempat*, pelatihan dan keahlian professional (*professional expertise and training*); faktor ini dapat mengilhami analis dan pembuat kebijakan dalam mendapatkan gagasan-gagasan pemecahan masalah yang tepat untuk mengatasi problem-problem khusus yang timbul dalam masyarakat. Keahlian dan pelatihan professional yang pernah didapat, akan memberikan suatu pelajaran yang berharga bagi analis dan elit kebijakan untuk menentukan informasi apa yang relevan, apa implikasi dari informasi tersebut, wacana apa

yang seharusnya dicari, dan siapa-siapa saja yang pantas diajak untuk mendiskusikan masalah tersebut.

*Kelima*, pengalaman terhadap kebijakan masa lalu (*memories of policy experiences*) menjadi pengalaman yang berguna untuk menghadapi suatu masalah yang mungkin mirip secara substansi, sehingga mempermudah analisis dan pembuat kebijakan dalam mencari informasi yang tepat dalam merealisasikan kebijakan tersebut.

*Keenam*, loyalitas dan komitmen pada intuisi atau partai politiknya (*political and intitutional commitments and loyalties*); faktor ini juga membentuk bagaimana mereka akan peka terhadap isu-isu khusus, bagaimana mereka akan menilai sesuatu perubahan dalam masyarakat, dan bagaimana mereka akan mempertimbangkan masalah dan pengambilan keputusan.

Dengan melakukan komunikasi dengan partai dan massanya, maka ia akan lebih mudah untuk mendapatkan informasi yang baik dan tepat, dan kemudian akan menolongnya menciptakan suatu orientasi pengambil keputusan secara mendasar mengenai bagaimana masalah-masalah tersebut harus didefinisikan dan permasalahan tersebut dipecahkan secara tepat.

## 2. Alternatif Pendekatan Model

Dalam proses pembuatan kebijakan publik kesulitan yang selalu muncul adalah bagaimana membuat pilihan atau keputusan yang tepat bagi pemecahan suatu masalah. Pertimbangan-pertimbangan yang mendasari pengambilan suatu keputusan kadang tidaklah transparan, dalam artian dapat diidentifikasi secara jelas faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Sering sekali pengambil kebijakan harus mengandalkan intuisi mereka untuk mengambil kebijakan yang tepat dari pada metode yang lebih ilmiah.

Meskipun cara pengambilan keputusan seperti itu tidak terlalu jelek, tetapi untuk lebih menjamin keakuratannya dan kualitas dari kebijakan nantinya, maka seorang analis harus tepat dalam memilih model analisis kebijakan untuk menganalisis masalah kebijakan. Kemampuan membuat, memilih, dan menggunakan model kebijakan seringkali menjadi faktor kritis dalam menentukan keberhasilan seorang dalam menyediakan informasi yang bermutu, valid, elegant, relevan,

dan up to date yang diperlukan oleh pembuat kebijakan.

Dengan begitu, maka penggunaan model analisis kebijakan yang tepat, paling tidak, dapat memberikan bantuan perbaikan kualitas kebijakan dalam hal:

*Pertama*, peningkatan efisiensi operasional;

*Kedua*, pengalokasian sumberdaya secara tepat;

*Ketiga*, manajemen lingkungan secara baik (analisa biaya dampak sosial);

*Keempat*, perencanaan dan penganggaran secara baik;

*Kelima* menghasilkan pilihan-pilihan alternatif yang secara strategic (analisa biaya-manfaat); yang selanjutnya akan berkontribusi pada kualitas kebijakan yang implementable dan dapat memecahkan masalah yang dihadapi secara efektif dan efisien.

Model pengambilan keputusan dapat berupa *rational-cornprehension*, *garbagecan* maupun *mixed scanning*. Analisis kebijakan dapat menggunakan model tersebut dalam melakukan analisis permasalahan kebijakan yang ada.

## C. PERAN ANALISIS MENJAGA KUALITAS

Sistem pembuat kebijakan publik pada setiap negara selalu bersifat kompleks dan rumit. Hal ini karena dalam prosesnya, pembuatan kebijakan merupakan aktivitas politik yang melibatkan banyak pihak. Tidak saja lembaga pemerintah tapi juga berbagai pihak yang terkait dalam kebijakan yang akan dikeluarkan tersebut.

Kekompleksan ini sudah dialami sejak tahap awal dari proses pengambil keputusan yakni sejak penyusunan agenda dan perumusan masalah. Keberhasilan dalam membentuk kesepakatan yang *fair* pada tahap ini, akan membantu stakeholders yang terlibat untuk dapat bekerja secara lebih baik dalam diagnosa masalah yang ada.

Di negara berkembang, termasuk Indonesia, para pengkaji dan pembuat kebijakan memiliki peran sentral dalam memprakarsai, membentuk, menyusun, dan menyokong kebijakan publik. Mereka adalah para aktor yang berperan penting yang seringkali menempatkan isu-isu suatu agenda tindakan pemerintah, menetapkan alternatif-alternatif, dan tak lupa menjadi pengawas dan implementasinya (Grindle dan Thomas 1991: 43). Keberhasilan dalam mengendalikan pembuatan kebijakan akan menjadi kunci dalam mengendalikan jalannya pemerintahan pemerintahan secara

umum. Contoh peran elite politik dan birokrasi serta akademisi adalah kelompok yang diandalkan dalam penentuan kebijakan.

Mengapa kondisi ini bisa terjadi? Jawaban yang diberikan oleh Grindle dan Thomas (1991,45) bisa mewakilinya, yaitu: bahwa pengambil keputusan dalam pemerintahan muncul sebagai aktor sentral dalam pengambilan keputusan karena pertama informasi yang tidak pasti (*uncertain information*); kedua, kemiskinan (*poverty*); ketiga, intervensi negara yang besar dalam ekonomi (*pervasive state influence making*); keempat, sentralisasi pembuat keputusan (*centralization of decision making*). Karakteristik ini pada gilirannya akan berpengaruh pada sifat dari aktivitas proses pengambilan atau kebijakan.

Walaupun ada kecenderungan semacam itu, namun para pengambil keputusan atau elit kebijakan tidak bisa lepas dari kebutuhannya akan peran analis kebijakan dalam proses perumusan masalah dan kebijakan. Baik itu di negara maju maupun di negara berkembang. Para pembuat kebijakan (*policy makers*) di berbagai sektor dan level senantiasa memerlukan pendamping analis kebijakan, baik yang berasal dari birokrat, politisian, ataupun kaum intelektual dari dunia pendidikan. Kecenderungan tersebut di Indonesia dapat dilihat dengan munculnya berbagai staf ahli atau staf khusus baik di lingkungan eksekutif, legislatif maupun yudikatif.

Kehadiran mereka menurut Meitner (1975:5) karena;

*Pertama*, elite kebijakan memerlukan informasi untuk membantu dirinya membuat keputusan-keputusan guna mengurangi atau menekan ketidakpastian;

*Kedua*, membutuhkan peran analis kebijakan karena itu merupakan kebiasaannya;

*Ketiga*, untuk menjelaskan atau membenarkan keputusan-keputusan yang telah dibuat. Boleh dikatakan bahwa pembuat kebijakan memerlukan analisis kebijakan karena analis kebijakan mampu memberi perlindungan (*protection*), agar mereka nampak *knowledgeable* dan tidak melakukan kesalahan, serta memberikan arah (*direction*) kemana pembuat kebijakan harus melangkah.

Seberapa jauh dan kuatnya peran analis kebijakan sangat bergantung pada hubungan antara keduanya dalam lingkungan sistem yang ada. Hubungan itu secara signifikan dapat dilihat dari tingkat komunikasi yang dilakukan antara pembuat kebijakan dan analis kebijakan, dan juga yang tidak kalah pentingnya aktivitas-aktivitas tertentu dan tingkat dukungan dari lingkungan

pemerintah atau birokrat. Perguruan Tinggi dalam berperan sebagai pusat riset, hendaknya dapat menciptakan komunikasi yang baik dengan para pengambil keputusan.

Oleh karena itu kemampuan politik berupa kapasitas dan kapabilitas menjalin hubungan dengan para pengambil keputusan menjadi salah satu faktor yang harus dimiliki. Kecenderungan yang terjadi saat ini, lembaga riset dan perguruan tinggi lebih terpaku pada aktivitas melakukan kajian kebijakan yang bersifat rutin formal dan strategic. Kesadaran akan hal tersebut menjadi penting, karena lembaga yang menjadi aktor pembuat kebijakan tentu tidak begitu saja dapat menerima berbagai informasi atau nasihat tentang analisa kebijakan yang telah dibuat oleh analis kebijakan melalui kajian dan risetnya. Mereka harus terlebih dahulu membangun kepercayaan (*trust*) dengan para *stakeholders* agar rekomendasi yang diberikan dapat digunakan atau dimanfaatkan secara lebih luas. Apalagi dalam kondisi lingkungan *policy makers* yang sangat powerfull, dalam pengertian hanya memberi ruang yang "kecil" bagi keterlibatan analis.

*Trust* disini bukan hanya kepercayaan, tetapi juga kesamaan tujuan (*goal congruence*). Analis kebijakan atau pengkaji harus meyakinkan bahwa ia mempunyai kesamaan tujuan dengan pembuat kebijakan. Pengetahuan dan pemahaman tentang klien (*klien concern*) serta karakteristik personalnya menjadi tahapan yang tidak bisa dihindari. Dengan demikian ujian pertama akan terlewati dan selanjutnya akan membantu analis kebijakan dalam menghadapi "gesekan-gesekan" politik dari para pejabat struktural di lingkungan tempat pembuat kebijakan itu berada. Hal tersebut dapat mencegah terjadinya pemblokiran informasi yang direkomendasikan.

Negara berkembang dengan sistem birokrasi yang strukturnya bersifat hierarkis seperti Indonesia, aturan-aturan kepentingan yang kaku dan terspesialisasi, akan sangat berpengaruh pada peran analis. Dinamika konteks birokrasi, akan menempatkan seorang pemegang jabatan dalam hierarki status yang lebih tinggi dibanding peran analis yang hanya sebagai staf atau spesialis yang bekerja pada pemegang jabatan tertentu.

Peran analis terlihat seolah termarginalkan dan seperti ada kesenjangan (*gap*). Penghargaan lebih tinggi diberikan kepada pejabat birokrasi dibanding kepada para analis kebijakan. Walaupun begitu, seorang analis juga harus terlibat dengan segala konsekuensi yang melekat pada birokrasi tersebut, untuk menjaga supaya bisa tetap diakui keberadaan dan perannya.

Seperti yang dikatakan oleh Meltser (1979: 168), seorang analis kebijakan yang berada dalam lingkungan birokrasi biasanya segera akan meniru karakteristik tempat kerjanya. Ia tidak bisa lepas dari kecenderungan yang ada pada organisasinya. Dengan perkataan lain bahwa dalam proses menyeleksi dan merumuskan suatu masalah, analis kebijakan harus memperhatikan nilai-nilai, norma, misi, dan tujuan dari institusi yang bersangkutan. Atau dengan perkataan lain, seorang analis harus menurut apa yang dikehendaki oleh "pembuat kebijakan" yang memang seharusnya tidak demikian.

Bagi seorang analis yang berasal dari lingkungan perguruan tinggi akademis atau cendekiawan yang independen, situasi seperti ini jelas akan menimbulkan "perang psikologis" dalam dirinya. Di satu pihak, jika ia ingin agar ide-idenya didengar dan digunakan, serta keinginan tetap eksis, maka ia harus berperilaku seperti layaknya para pembuat kebijakan tersebut. Artinya ia harus loyal kepada klien, bertindak seperti yang diinginkannya.

Disisi lain, analis tersebut, terpaksa harus membuang jauh kebebasan bahkan obyektifitasnya. Jika hal tersebut tidak dilakukan, maka ia akan tersisihkan. Fenomena seperti ini dapat kita lihat pada pemerintahan di masa lalu dimana analis yang berseberangan dengan pemegang kekuasaan, maka dapat dipastikan kariernya tidak akan bertahan lama dalam birokrasi. Ataupun sebaliknya para staf khusus yang tidak objektif memberikan saran atau telatahannya kepada pimpinannya tanpa dilandasi kejujuran.

Bukan itu saja, di masa lalu bahkan sampai saat ini pun, para analis kebijakan yang berasal dari dunia akademik sangat rentan terimbas penyimpangan-penyimpangan (patologi) yang terjadi dalam birokrasi. Hal tersebut dapat menyebabkan para analis bertindak seperti halnya birokrat yang bekerja hanya mengorbankan kepentingan publik. Memang tidak dapat di jadikan suatu pembenaran bahwa financial atau uang menjadi satu-satunya motivator kuat bagi para analis atau policy makers, tetapi hal tersebut hendaknya diimbangi pula oleh suatu hasil kebijakan yang benar-benar berkualitas yang mencerminkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Berbagai faktor yang tidak dapat dihindari dimana seorang analis kebijakan memiliki kerentanan terhadap birokrasi dimana para pembuat kebijakan itu berada, antara lain:

*Pertama*, mereka adalah anggota profesional yang muncul tanpa ada standar atau sanksi

yang dapat diterapkan. Belum ada kode etikanalisis yang jelas seperti halnya pada dunia dokter, sehingga tidak ada jaminan hukum baginya apabila ia tidak konsisten dengan tugasnya;

*Kedua*, kurang memiliki kecakapan politik, termasuk didalamnya adalah kemampuan melakukan komunikasi politik dan administrasi dengan pembuat kebijakan;

*Ketiga*, kurang cukup dasar pengetahuan dan pemahaman teoritik yang berhubungan dengan kebijakan publik;

*Keempat*, sistem birokrasi yang menuntut loyalitas yang tinggi sehingga tidak mengherankan jika mereka tunduk kepada birokrasi dan juga insentif.

Dengan demikian, sebagai seorang analis kebijakan, ia pun memiliki kepentingan atau dorongan dan motivasi tertentu terhadap peran yang di jalankan, sehingga ia tidak begitu saja keluar dari sistem birokrasi pembuatan kebijakan publik. Maltser (1979:48) dalam analisisnya terhadap para analis di Amerika Serikat menemukan ada 3 tipe analis, yang masing-masing memiliki dorongan atau motivasi berbeda untuk bekerja dalam proses pengkajian kebijakan, seperti **teknisian**, yang melihat perannya dalam birokrasi merupakan kesempatan untuk melakukan riset kebijakan. Sikapnya terhadap proses analisis kebijakan sangat obyektif dan apolitik. Kemudian **politisi**, melihat perannya sebagai kesempatan untuk meningkatkan atau menonjolkan kemampuan pribadinya dan mencari pengaruh pribadi, sehingga tidak heran jika sikapnya terhadap analis kebijakan sebagai alat untuk mencari pengaruh pribadi dan yang ketiga adalah *entrepreneur*, motivasinya adalah murni untuk aktualisasi diri karena memiliki kemampuan politik dan analisis masalah kebijakan yang tinggi.

Analisis kebijakan digunakan sebagai alat untuk mempengaruhi kebijakan. Harapannya adalah terjadinya perubahan bagi kehidupan masyarakat yang lebih baik. Jika hal tersebut tidak terjadi, maka ia akan keluar dari lingkungan birokrasi pembuat kebijakan.

Apabila dikaitkan dalam konteks Indonesia, maka ketiga tipe analis di atas, bisa juga ditemukan disini. Tapi untuk tipe yang ketiga, rasanya masih terlalu jauh dari harapan. Bukan berarti orang-orang tersebut tidak ada, melainkan mereka umumnya lebih memilih untuk berada di luar birokrasi dari pada di dalam birokrasi. Itupun masih sangat relatif. Seperti yang dikatakan sebelumnya, mungkin karena tergiur oleh finansial dan kekuasaan, mereka bisa masuk dalam birokrasi dan

melupakan idealismenya.

Berkaitan dengan idealisme, dinegara maju seperti Amerika, para analis kebijakan memegang teguh prinsip obyektivitas dalam menganalisa persoalan sampai pada akar permasalahan dan saran-saran pemecahannya. Bahkan mereka sangat khawatir apabila saran-saran atau informasi yang diberikan salah atau tidak dapat menyelesaikan masalah. Bukan hanya tanggung jawab moral pribadi analis saja tetapi masyarakat disana pun memiliki budaya rasional, yang bisa melakukan "warning system" terhadap apa yang dilakukan oleh analis dan pembuat kebijakan. Berbeda dengan Indonesia, budaya paternalistik yang kuat dalam masyarakat, membuat mereka "enggan" untuk melakukan peringatan atau kontrol terhadap para analis ataupun *policy makers*, tetapi bisa sebaliknya justru mendukung kebijakan yang kurang tepat.

Selain ketiga tipe analis tersebut di atas, fenomena menarik yang ada di Indonesia yaitu munculnya analis dari dunia supranatural yakni paranormal dan pesehat spiritual. Andaikata Meltsner (1979) melakukan risetnya di Indonesia, maka is akan menemukan tipe keempat ini. Walaupun irasional, tapi para eksekutif dan pejabat politik Indonesia menggunakan peran analis ini sebagai upaya untuk melanggengkan kekuasaan melalui kebijakan-kebijakannya, bahkan dengan maksud agar terlihat sebagai *knowledgeable person*.

Analisisnya meskipun bernuansa spiritual dan magis dengan menggunakan insting, tapi saran atau informasinya lebih dipercaya daripada yang berasal dari analis kaum intelektual yang menggunakan rasio. Bahkan atas saran dari para penasihat spiritual, *policy makers*, bisa melakukan tindakan irasional dengan melakukan kontemplasi di tempat-tempat sakral tertentu yang bisa mendatangkan *wangsit* untuk memecahkan masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat. Maka, tidak jarang banyak keputusan-keputusan atau kebijakan yang dibuat setelah kembali dari tempat-tempat sakral tersebut. Jadi dapat dikatakan bahwa kondisi lingkungan birokrasi yang sebetulnya sangat rasional, bisa menjadi irasional jika dihadapkan dengan fenomena seperti yang ada di Indonesia.

Perlu disadari bahwa perhatian dan pemahaman tentang lingkungan birokrasi pembuat kebijakan merupakan faktor penting bagi para analis atau peneliti dalam menjalankan perannya. Selain faktor tersebut, kepekaan terhadap komunikasi politik harus dimiliki oleh para analis. Hasil analisis kebijakan yang diperoleh melalui metode ilmiah yang baik dan benar, tidak akan bermanfaat secara optimal apabila rekomendasi

atau saran kebijakan sebagai hasil analisis tidak dikomunikasikan dengan baik kepada para pejabat yang mempunyai pengaruh dalam proses pembuatan kebijakan publik.

Hal tersebut barangkali menjadi salah satu titik kelemahan berbagai perguruan tinggi dan lembaga riset sehingga *bargaining power* dan *position* kitapun menjadi lemah di mata para pejabat pembuat kebijakan publik. Padahal, sesungguhnya peran perguruan tinggi seharusnya menjadi yang merupakan *think tank* pemerintah dalam riset kebijakan negarakemampuan untuk memetakan lingkungan kebijakan dan pembuat kebijakan yang berkembang akan menjadikan hasil riset atau analisis kebijakan dapat mencapai sasaran yang tepat, khususnya dalam aktivitas pembuatan kebijakan.

Memang tidak mudah untuk menerka kondisi lingkungan politik dan birokrasi pembuat kebijakan. Tetapi dengan upaya terus menerus yang bersifat konsisten berlandaskan perkembangannya yang ada, baik itu kejadian-kejadian, pelaku, konsekuensi-konsekuensi, kriteria, dan informasi yang terus bergeser serta berubah dalam masyarakat 'dunia politik' akan menjadikan analisis hasil riset dapat diterima, secara sadar atau tidak, baik itu oleh pembuat kebijakan maupun oleh masyarakat.

Selain memperhatikan kompetensi dalam aspek komunikasi politik, hal ini yang tidak kalah pentingnya adalah analis kebijakan dalam kajian atau risetnya harus mampu melaksanakan analisis masalah kebijakan dengan memperhatikan hal-hal berikut:

*Pertama*, masalah kebijakan yang hendak dipecahkan haruslah memperhatikan kepentingan yang dipengaruhi yakni kepentingan yang sekurang-kurangnya semua orang merasa diuntungkan atau berpihak pada aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Hak tersebut dapat mencegah dan mengurangi konflik atau resistansi dalam implementasinya.

*Kedua*, tidak menuntut perubahan perilaku yang mendasar bagi masyarakat, kelompok kepentingan, ataupun partai.

*Ketiga*, didukung oleh sumber daya yang ada.

*Keempat*, keterbukaan dan partisipatif, ini penting karena jika dominasi keputusan ada pada pihak analis dan pembuat kebijakan maka akan muncul konflik, unjuk rasa, dan semacamnya.

Akhirnya, walaupun gambaran teoritis dan empiris yang dijelaskan di atas diperhatikan oleh analis kebijakan dengan sakasama, namun perlu disadari pula bahwa tidaklah mudah untuk menjelaskan syarat-syarat kesuksesan atau

kegagalan rekomendasi hasil analisis kebijakan yang berkualitas dan tepat sasaran. Tugas yang tidak mudah akan dihadapinya pada saat melakukan konseptualisasi dan aktualisasi terhadap model empiris dalam proses analisa kebijakan dikaitkan dengan teori yang ada.

Meskipun demikian hal yang paling penting adalah *pertama*, bagaimana analis menstimulus dan mendiagnosa masalah yang timbul dalam masyarakat secara benar dan tepat melalui proses serta metode ilmiah yang tepat pula. Hal ini pun tidak dapat menjamin bahwa kebijakan yang di buat akan bisa terimplementasikan dengan baik. *Misinterpretasi* terhadap kebijakan yang dibuat bisa terjadi.

Oleh karenanya, maka poin *kedua* ini harus diperhatikan yaitu dampak, karena hasil analisis kebijakan publik bukan berasal dari perubahan *policy makers* tetapi mempunyai tujuan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Hal tersebut mensyaratkan keterlibatan analis secara berkesinambungan dalam tahapan proses selanjutnya.

Berdasarkan hal tersebut maka Miltsener (1979:269) mengusulkan beberapa langkah penting:

*Pertama*, analis kebijakan harus memperhatikan langkah-langkah implementasi. Maksudnya bahwa ia tidak cukup berada pada tahap mendefenisikan dan merekomendasikan masalah kebijakan, tetapi analis juga harus terlibat dalam proses bagaimana melakukannya;

*Kedua*, pengambil keputusan bisa meminta pertanggung jawaban analis kebijakan tentang hasilnya di lapangan bukan hanya di atas kertas;

*Ketiga*, bila perlu analis perlu menerima umpan balik, negatif maupun positif, atas kualitas estimasi dan rekomendasi yang di buatnya.

Hal ini dapat dijadikan sebagai masukan yang konstruktif bagi upaya pembelajaran yang lebih mendalam dan tepat terhadap persoalan publik yang muncul di masyarakat.

Ulasan di atas menyimpulkan bahwa semakin sering analis kebijakan berhubungan dengan atau berkolerasi dengan para *stakeholder* yaitu masyarakat, pembuat kebijakan, dan petugas di lapangan yang menyediakan data maka hal tersebut akan sangat membantu proses hasil kajian atau analisis kebijakan publik yang sedang dilakukan.

Anggapan sebagian analis kebijakan bahwa dengan ilmu pengetahuan, kebijakan akan terselesaikan adalah suatu hal yang belum pasti jaminannya. Meskipun dari segi pengetahuan analis mungkin tahu semua hal, bukanlah

jaminan bahwa hasil analisis kebijakannya berkualitas.

Keberagaman masyarakat dengan tingkat kepercayaan yang berbeda, kelompok kepentingan, partai politik, kondisi birokrasi dan lingkungan politik yang itdak menentu, bisa menjadi hambatan berupa pertarungan kepentingan atau konflik di dalam sistem kebijakan yang berdampak pada gagal atau berhasilnya analisis kebijakan yang di bangun.

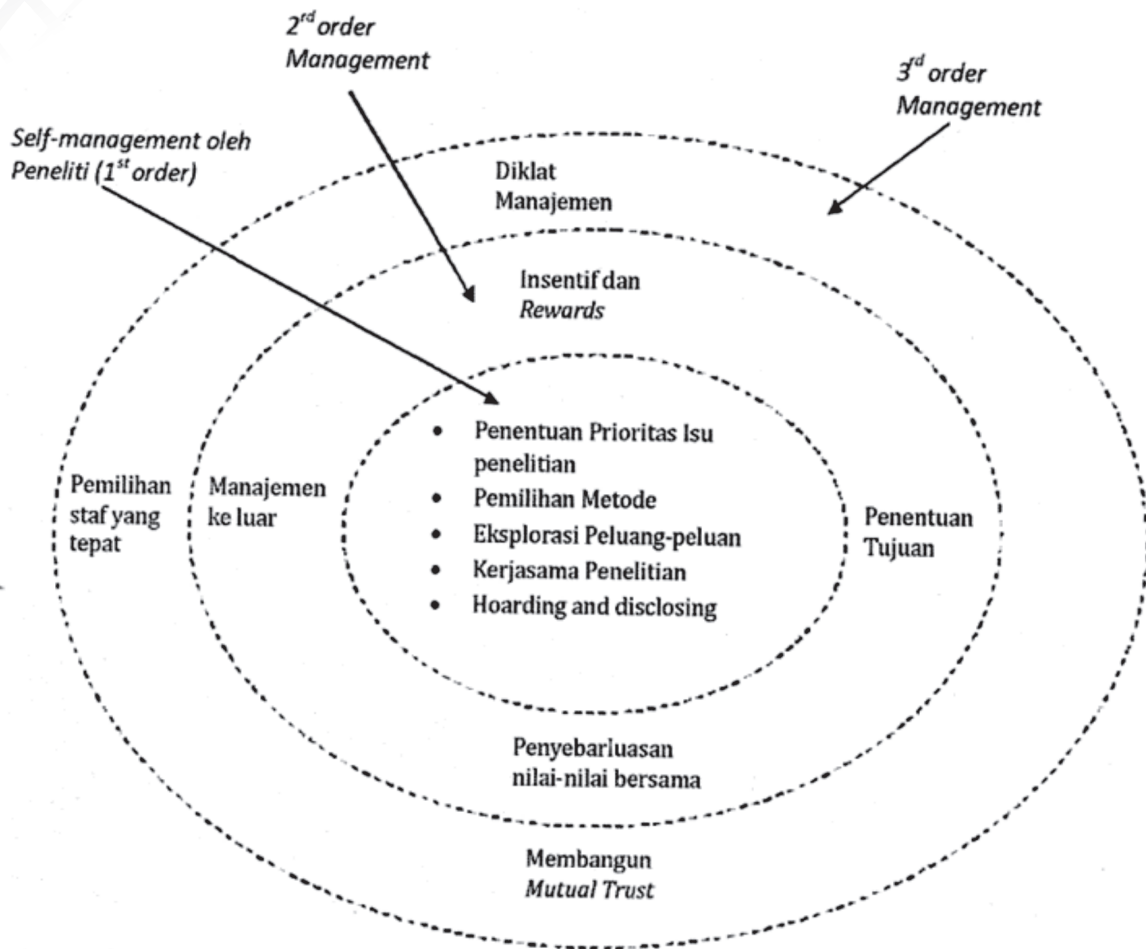
Oleh karena itu perlu diingat oleh analis kebijakan, atau para peneliti bahwa pemahaman akan faktor-faktor tersebut d dunia nyata menjadi sama pentingnya dengan pengetahuan untuk mendukung keberhasilan aktivitas riset untuk mendukung lahirnya hasil analisis kebijakan yang berkualitas yang berpihak pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Hal tersebut merupakan salah satu cara untuk memperoleh jaminan kepercayaan publik (*publik trust*) dari *stakeholder* terhadap proses riset kebijakan atau riset yang dilakukan sehingga terlahir kebijakan yang berguna untuk memecahkan masalah yang dihadapi bangsa dan Negara.

#### D. PENGELOLAAN RISET DI PERGURUAN TINGGIDAN KELITBANGAN LAINNYA

Tantangan utama pengelolaan riset terletak pada perbedaan tradisi keilmuan dari para analis dengan para pengelola bidang riset. Pengetahuan substantif riset belum sepenuhnya didukung oleh pengetahuan tentang tata kelola penelitian secara administratif. Norma dan nilai-nilai ilmiah yang dimiliki para peneliti berbeda dengan prinsip-prinsip manajemen atau tata kelola riset yang bersifat administratif. Mintzberg misalnya, sebagaimana dikutip oleh Erno-Kjohlhede (2001), menyebut organisasi riset di perguruan tinggi di sebut sebagai "*professional bureaucracies*".

Birokrasi yang bersifat terdesentralisasi dimana para researcher dapat mengontrol penuh aktifitas mereka untuk melakukan analisisnya terhadap berbagai masalah dan urusan publik. Biroktasi ini juga bersifat independent dan hasil rekomendasi yang diambil secara rasional akademis. Berbeda dengan birokrasi pada umumnya yang sangat hierarkis.

Tata kelola sebuah lembaga penelitian harus memperhitungkan otonomi yang pada umumnya diinginkan oleh para analis dalam menentukan area dan metode riset. Oleh karena itu, Erno-Kjohlhede (2001) menyarankan sebuah kerangka pikir dalam melihat tata kelola riset (lihat gambar berikut ini).



Erno-KjOlhede (2001) membagi area manajemen kedalam tiga tingkat.

Tingkat pertama, *1<sup>st</sup> order management*, adalah area dimana para researcher memiliki kewenangan dalam menentukan dan melakukan akativitasnya. Area ini memeberikan kesempatan kepada para researcher untuk menentukan prioritas isu yang diteliti, memilih dan menentukan metoderiset.

Tingakatan kedua, *2<sup>nd</sup> order management*, adalah area manajemen dimana para administrator dapat menciptakan iklim yang kondusif yang memungkinkan para analis dapat bekerja dengan baik dalam lingkungan kerja atau organisasinya. Area kedua ini, menunjukkan isu tata kelola riset pada penentuan tujuan (*goals*) dari organisasi yang harus diperhatikan pula oleh seluruh komponen dalam organisasi, termasuk hubungan para penelitiinya dengan pihak luar.

Tingkat ketiga, *3<sup>rd</sup> order management*, adalah area manajemen yang berkaitan dengan isu-isu membangun rasa sating percaya diantara seluruh komponen perguruan tinggi sistem

pengembangan karir dosen/peneliti yang baik, termasuk *sharing knowledge* berada di dalamnya. Dalam area ini membangun trust juga dilakukan dengan lingkungan eksternal, yaitu kepada badan publik atau aktor pembuat kebijakan dan lembaga riset.

Semua perguruan tinggi di Indonesia saat ini dengan lebih tepat untuk dikategorikan sebagai perguruan tinggi pendidikan/pengajaran tentu harus berupaya untuk mentransforma-sikan diri menuju perguruan tinggi riset dan penganalisis kebijakan.

Sebagaimana diketahui bahwa secara ideal tugas para dosen adalah apa yang disebut *tridarma*: pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. Namun pada kenyataannya tugas utama para dosen di perguruan tinggi masih bertumpu pada tugas pendidikan dan pengajaran. Dengan demikian, waktu yang tercurah lebih banyak untuk mengajar dan segala aktivitas terkait, seperti pembuatan bahan-bahan ajar dan persiapan administratif lainnya.

Kegiatan riset yang dilakukan oleh para dosen dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok.

Pertama, adalah kegiatan riset yang terkait dengan tugas pembimbingan mahasiswa, advokasi dan sebagai tenaga ahli.

Kedua, kegiatan riset yang dilakukan oleh kelompok dosen yang memiliki minat yang sama, biasanya kelompok dosen ini mencari pendanaan dari skema pendanaan Dirjen Dikti, kerjasama lembaga atau Lembaga Ristek.

Ketiga, adalah kegiatan riset bekerja sama dengan pihak luar, terutama pihak user.

Namun, kegiatan riset yang ketiga lebih merupakan kajian untuk memecahkan masalah yang dihadapi industri. Seringkali, kegiatan ini tidak menghasilkan publikasi. Kegiatan penelitian yang dilakukan di atas inisiatif kelompok peneliti dan yang terkait dengan pembimbingan mahasiswa, terutama mahasiswa S2 dan S3, lebih memungkinkan untuk menghasilkan publikasi, paling tidak publik nasional.

Mengenai pendanaan untuk riset mandiri, pada umumnya kementerian ataupun perguruan tinggi tidak mendapatkan porsi yang cukup proposional dari pemerintah, tapi harus berupaya mencari sendiri dari berbagai sumber, termasuk Dirjen Dikti, Lembaga Ristek, Lembaga Donor, PEMDA dan sebagainya. Selebihnya, para dosen harus mencari danarisetnya dari pihak luar: masyarakat industri, instansi pemerintah lainnya atau dari luar negeri. Nampaknya sebagian besar para dosen mendapatkan kesulitan.

Anggaran untuk melakukan riset terkait isu-isu kontemporer kebijakan bersifat terbatas. Padahal, seperti di ketahui bahwa riset merupakan salah satu *Tridharma* Perguruan Tinggi yang wajib dilakukan oleh para dosen. Perlu pengkajian ulang mengenai anggaran untuk kegiatan riset, kajian atau riset yang dilakukan sebagai wujud komitmen penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Bahwa dalam praktiknya terdapat tumpang tindih kajian atau riset yang dilakukan terkait substansi masalah riset yang akan di teliti, maka langkah yang harus ditempuh adalah perlu terus dilakukan koordinasi dan komunikasi yang intens serta terarah antar lembaga riset. Agar muara kajian riset variatif dan tidak tumpang tindih.

Sehubungan dengan hal di atas, tata kelola riset pengembangan juga terhambat oleh indikasi belum adanya budaya penelitian dan budaya menulis karya ilmiah bagi setiap dosen atau peneliti yang ada. Termasuk budaya penganalisisan di birokrasi pemerintah.

Hendaknya berbagai analisis atau riset yang dilakukan terkait kebijakan publik dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang aplikatif, selain disampaikan atau di

rekomendasikan kepada pembuat kebijakan user perlu juga dilakukan publikasi. Sebab salah satu indikator adanya budaya riset yang kuat adalah adanya suatu iklim atau kondisi kerja yang disebut "*Publish or Perish*" (Publikasi atau Musnah), artinya dalam perjalanan karirnya, seorang peneliti atau penganalisis dihadapkan pada dua pilihan: giat mempublikasikan risetnya dalam jurnal ilmiah, media atau sebaliknya, status kepenelitiannya tidak dipercaya. Kondisi seperti ini perlu di bangun. Tidak adanya iklim yang mendorong kompetisi membuat motivasi para researcher atau penganalisis kebijakan untuk memperbanyak publikasinya masih sangat rendah.

Idealnya dalam perguruan tinggi dan lembaga riset lainnya yang salah satu perannya adalah melakukan riset atau analisis kajian, diperlukan berbagai persyaratan berikut, yaitu :

- Adanya komitmen
- Kejelasan tujuan organisasi penelitian Nilai-nilai bersama
- Penghargaan terhadap prestasi penelitian Mutual trust
- Kajian yang tepat kualitas
- Otonomi penelitian
- Fasilitas penelitian yang memadai

Dengan demikian perguruan tinggi akan mampu memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi bangsa dan Negara serta mampu menjawab terhadap kebutuhan *actual stakeholder*.

## E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dalam menuju perguruan tinggi berbasis riset dan Penganalisis kebijakan membutuhkan peran dari berbagai pihak dalam menjalankannya, dimana peran dan kedudukan Perguruan Tinggi pada umumnya dalam mendukung proses risetnya untuk memberikan saran kebijakan berbasis pengetahuan, maka aktivitas riset/kajian dan/atau analisis kebijakan menjadi suatu yang wajib untuk dilakukan.

Oleh karena itu, salah satu peran yang harus dijalankan Perguruan Tinggi dalam melaksanakan *Tridharma* Perguruan Tinggi salah satunya adalah kegiatan penelitian yang harus mendapat dukungan dan perhatian dari pemerintah.

Berkaitan tujuan studi kebijakan tidak sekedar membuat keputusan yang lebih efektif dan efisien, tetapi juga berupaya menawarkan solusi melalui pendekatan ilmu (metodologi analisa kebijakan) untuk memperbaiki pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah secara lebih baik dengan memecahkan persoalan-persoalan

masyarakat yang kompleks dan penuh interdependensi.

Maka kemanfaatan dari analisis masalah kebijakan dalam kerangka pembuatan kebijakan publik selalu diperuntukan bagi kemaslahatan masyarakat dan negara serta dunia secara global. Berkaitan dengan hal tersebut, maka kualitas kebijakan publik tentunya menjadi syarat utama, dalam analisis kebijakan.

Berkaitan dengan proses kebijakan yang berkualitas maka, proses analisis kebijakan dalam memperbaiki kualitas kebijakan sangat bergantung pada seberapa valid, elegant, bermutu, *up to date*, atau berguna informasi yang dihasilkan dan diberikan tim pengkaji atau analisis kebijakan kepada *policy makers* dalam mengambil kebijakan guna mengatasi permasalahan-permasalahan publik yang muncul. Informasi yang diharapkan demikian itu, tentunya membutuhkan persyaratan-persyaratan antara lain: Kualitas Riset & Tim Analisis Kebijakan, dan Alternatif Pendekatan Model.

Dengan memperhatikan proses kebijakan ini suatu Penganalisis kebijakan dapat menghasilkan informasi yang tepat. Maka pengelolaan penelitian dan Penganalisis kebijakan publik di Perguruan Tinggi sangat penting dalam mencapai perubahan dalam menuju Perguruan Tinggi berbasis riset dan pemberi saran kebijakan.

#### DAFTAR PUSTAKA

Erik ErnO-Kjohede et.al., 2001. *Managing University Research in the Triple Helix*. Science and Publik Policy, volume 28, number 1, February 2001.

Etzkowitz, H. 1999. *Bridging the Gap : The Evolution of Industry-University Links in the United States*. Dalam *Industrializin Knowledge* di edit oleh Lewis M. Branscomb et.al. The MIT Press, Massachusetts.

Grindle, Merilee S. & Thomas, Jhon W. 1991. *Publik Choice and Policy Changes: The Political Economy of in Developing Countries*. The Jhon Hopkins University Press.

Howlett, Michael & Ramesh, M. 1995. *Studying Publik Policy: Policy Cycles and Policy Subsystem*. Oxford University Press.

\_\_\_\_\_. 2011. *Designing Publik Policies: Principle and Instruments*, Routledge.

KRT (Kementrian Riset dan Teknologi), Deputi Pengembangan Sistem IPTEK Nasional, 2004. *Buku Saku Indikator IPTEK Indonesia*.

Meltsener, Arnold J. 1979. *Policy Analisis in The Bureaucracy*. University of California Press, Berkeley.

Mulyadi, Deddy. 2009. *Isu-Isu Aktual Administrasi Publik Membidik Jalan Menuju Publik Trust*. Bandung: STIA LAN Bandung Press.

\_\_\_\_\_. 2015. *Studi Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Rosenbloom, David H, Robert Kravchuk & Richard M. Clerkin. 2008. *Publik Administration: Understanding Management, Politics, and Law in the Publik Sector Seventh Edition*. Singapore: McGraw-Hill Companies

Ripley, Randall B. 1985. *Policy Analysis in Political Spence*. Chicago: Dorsey Press.

Samodra Wibawa. 2009. *Isu-Isu Kontemporer Administrasi Negara*. Graha Ilmu.